

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN STANDAR DOSEN PADA PROGRAM STUDI ADMINISTRASI BISNIS POLITEKNIK INFORMATIKA NASIONAL

Nasir

Email: nasir@unm.ac.id
Universitas Negeri Makassar

Abstract

Speakers have a very important role as the front guard in the implementation of all educational preparations. They contribute overall to educational preparation and learning, so to promote a higher quality of teaching, speakers play an important role, especially in universities. The strategy used in this research is the Subjective Expressive strategy. This strategy is considered very reasonable because this research is descriptive in nature, that is, it aims to describe and observe the implementation of teacher standard regulations in the Trade Organization Study Program at the National Informatics Polytechnic. Preparation for examining information in this investigation includes several steps:

gathering information, reducing information, recognizing information, confirming, interpreting information, and drawing conclusions. This research shows that in general the use of the Speaker Measures approach in the Trade Organization Reflection Program at the National Informatics Polytechnic is not appropriate. Based on research conducted using the level of compliance approach, smooth use of schedule capacity, and the anticipated impact approach, as proposed by Randall B. Repley and Beauty A. Franklin, several obstacles were found. This prevention includes:

There are still speakers who do not have scholastic positions, the proportion of speakers to students has not been met, and there is a need for speaker involvement in carrying out research and benefiting society.

Keywords: Policy implementation, Lecturer Standard, Business Administration Program

Abstrak

Pembicara mempunyai peran yang sangat penting sebagai garda terdepan dalam pelaksanaan seluruh persiapan pendidikan. Mereka berkontribusi secara keseluruhan terhadap persiapan pendidikan dan pembelajaran, sehingga untuk meningkatkan kualitas pengajaran yang lebih tinggi, pembicara memainkan peranan penting, khususnya di perguruan tinggi. Strategi yang digunakan dalam penelitian ini adalah strategi Subyektif Ekspresif. Strategi ini dinilai sangat masuk akal karena penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu bertujuan untuk menggambarkan dan mengamati pelaksanaan peraturan standar guru pada Program Studi Organisasi Perdagangan di Politeknik Informatika Nasional. Persiapan pemeriksaan informasi dalam penyelidikan ini mencakup beberapa langkah: pengumpulan informasi, pengurangan informasi, pengenalan informasi, konfirmasi, interpretasi informasi, dan penarikan kesimpulan. Penelitian tersebut menunjukkan

bahwa secara umum penggunaan pendekatan Speaker Measures pada Program Renungan Organisasi Perdagangan di Politeknik Informatika Nasional belum sesuai. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan tingkat kepatuhan, kelancaran penggunaan kapasitas jadwal, dan pendekatan dampak yang diantisipasi, sebagaimana dikemukakan oleh Randall B. Repley dan Beauty A. Franklin, ditemukan beberapa kendala. Pencegahan ini mencakup:

masih terdapat penutur yang belum mempunyai jabatan skolastik, belum terpenuhinya proporsi penutur terhadap mahasiswa, dan perlunya keterlibatan penutur dalam melaksanakan penelitian dan kemaslahatan masyarakat.

WKata Kunci : Implementasi Kebijakan, Standar Dosen, Program Studi Administrasi Bisnis

1. Pendahuluan

Masalah kualitas pendidikan sebenarnya telah lama menjadi perbincangan, dan pemerintah telah menetapkan hal ini melalui peraturan perundang-undangan dan kebijakan. Dengan dibentuknya Pemerintah Republik Indonesia, sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menekankan pentingnya mencerdaskan kehidupan bangsa, serta Pasal 31 ayat 1 menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki hak mendapatkan pendidikan. Kebijakan Nasional untuk meningkatkan kualitas pendidikan diatur pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, di mana Pasal 3 bertujuan untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan kualitas dan martabat kehidupan manusia Indonesia guna mencapai tujuan nasional. Untuk memastikan akses yang terarah dalam pemerataan dalam penyelenggaraan peningkatan kualitas pendidikan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan dalam Pasal 35 ayat 1 menyatakan bahwa Standar Nasional Pendidikan mencakup: Standar Isi, Standar Proses, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan, dan Standar Penilaian Pendidikan yang secara terus-menerus ditingkatkan secara terencana dan bertahap.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Pasal 1, poin 18 dan Pasal 54, ayat 2) mengatur bahwa Standar Nasional Pendidikan Tinggi mencakup standar pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (Pasal 3) bertujuan untuk mendorong kemajuan pendidikan nasional dengan menerapkan

manajemen berbasis sekolah/madrasah di pendidikan dasar dan menengah, serta memberikan kemandirian bagi perguruan tinggi.

Agar perguruan tinggi dapat menjaga nilai-nilai akademik dan ilmiah, lembaga ini harus bersifat independen dengan tata kelola yang akuntabel dan berbasis otonomi sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 2012. Hal ini bertujuan untuk menjamin kebebasan akademik dan ilmiah bagi komunitas akademika, sehingga mereka dapat berkembang menjadi akademisi dan peneliti yang unggul serta memenuhi tanggung jawabnya kepada para pemangku kepentingan. Model akuntabilitas krusial karena karena institusi pendidikan tinggi perlu memastikan bahwa setiap kinerja elemen yang ada telah memenuhi harapan para stakeholder, dengan menyediakan proses pendidikan yang bermutu. Pemangku kepentingan dalam konteks lembaga pendidikan tinggi meliputi komunitas, pemerintah, dan lembaga pendidikan tinggi itu sendiri. Tanggung jawab kinerja lembaga pendidikan tinggi merujuk pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 mengenai Pendidikan Tinggi. Dalam hal ini, terdapat elemen-elemen utama dan pendukung dalam pendidikan tinggi. Komponen utama terdiri dari: proses belajar mengajar, kurikulum, pengajar, sarana pembelajaran, pendanaan, dan penelitian. Sementara itu, elemen pendukung terdiri dari pengelolaan dan kepemimpinan (Rachmawati, 2023).

Politeknik Informatika Nasional, berdiri di Makassar pada tahun 2010 berdasarkan SK Mendikbud Nomor 130/D/O/2010, memiliki 4 program studi: Administrasi Bisnis (AB), Manajemen Informatika (MI), Administrasi Pemerintahan, dan Akuntansi Keuangan Publik (AKP). Untuk mencapai kualitas pendidikan yang optimal, diperlukan dosen yang memenuhi standar sesuai Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015.

Pada Semester Ganjil 2017/2018, ditemukan bahwa 7 dosen mengajar di luar kualifikasi akademiknya, 10,34% dosen hanya berijazah S1, dan 6 dosen mendapatkan nilai kepuasan 3,50 (skala 1-5). Selain itu, 30% dosen merupakan dosen tidak tetap dan hanya 34,48% dosen memiliki jabatan akademik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan standar dosen pada Program Studi Administrasi Bisnis Politeknik Informatika Nasional.

2. Kajian Pustaka

Menurut Jones dalam (Mulyadi, 2015) Implementasi : "Actions aimed at implementing a program." (cara untuk menciptakan program sampai mendapatkan tujuannya), selanjutnya Horn dan Meter: "Actions taken by individuals or groups from both public and private sectors to achieve the goals outlined in previous policies."" (Kegiatan yang dilakukan oleh orang atau kelompok, baik dari pihak terbuka maupun swasta, untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan dalam pengaturan yang lalu). Dapat diartikan implementasi merujuk perbuatan yang dilaksanakan setelah kebijakan ditentukan. Pelaksanaan sesuatu cara supaya suatu kebijakan dapat mencapai sasaran yang diinginkan.

berdasarkan pendapat Lister (Taufik, 2013), implementasi berkaitan dengan seberapa jauh tindakan yang telah direncanakan dapat memenuhi harapan. Grindle (Mulyadi, 2015:47), menyatakan bahwa Eksekusi dapat berupa pengaturan kegiatan regulasi yang dapat dinilai pada tingkat program tertentu. Horn (A., 2014), Eksekusi dicirikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang, penguasa, atau kelompok dari sektor instansi pemerintah atau kantor swasta, yang bertujuan untuk mewujudkan sasaran-sasaran yang tertera dalam pengaturan..

Syaukani dkk, dalam (Pratama, 2015), implementasi adalah tahapan dalam proses kebijakan umum di suatu negara. Pada umumnya, implementasi dilakukan setelah kebijakan disusun dengan sasaran yang jelas, baik untuk jangka waktu pendek, menengah, dan panjang.

Kebijakan publik adalah program yang mencakup penyediaan fasilitas dan infrastruktur oleh organisasi atau institusi publik, yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat luas. Proses perumusan kebijakan ini mempertimbangkan berbagai faktor, baik pendukung maupun penghambat. Para ahli memiliki pandangan yang beragam mengenai pengertian kebijakan publik, namun pada intinya kebijakan ini berfungsi untuk mengatur, mengarahkan, dan mempengaruhi tindakan publik agar mencapai tujuan bersama. Menurut (Thoha, 2014), dalam pengertian yang luas, Kebijakan terdiri dari dua aspek utama: (1) Kebijakan adalah suatu praktik sosial, bukan kejadian terpisah bahkan terisolasi. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah berasal berbagai peristiwa di tengah masyarakat serta digunakan demi kebaikan masyarakat. Peristiwa tersebut ada dari

praktik hidup sosial tidak berdiri sendiri atau terpisah dari masyarakat. (2) Kebijakan adalah upaya yang dilakukan untuk mengakomodasi klaim pihak-pihak yang berdebat, serta untuk membentuk kekuatan yang memotivasi untuk melakukan kegiatan bersama, khususnya bagi pihak-pihak yang menetapkan tujuan tetapi menerima perlakuan yang kurang seimbang dalam partisipasinya. Dari dua perspektif ini, dapat disimpulkan bahwa kebijakan di satu sisi merupakan usaha kompleks yang bertujuan untuk kepentingan masyarakat, dan di sisi lain adalah teknik untuk menyelesaikan konflik serta menciptakan insentif.

Menurut Laswell dan Kaplan (Nugroho, 2014), kebijakan publik adalah sebuah program yang dirancang dengan tujuan-tujuan, nilai-nilai, dan praktik-praktik tertentu. Sementara itu, Syafiie (Tahir, 2014:20), menekankan bahwa kebijakan (policy) perlu dibedakan dari kebijaksanaan (wisdom). Kebijaksanaan adalah penerapan aturan yang telah ditetapkan oleh pejabat berwenang, disesuaikan dengan situasi dan kondisi setempat. Kebijakan publik berfungsi sebagai solusi terhadap masalah, berupaya untuk mengatasi, mengurangi, atau mencegah hal-hal buruk, serta mendorong inovasi dan kebaikan melalui tindakan yang terarah dan optimal.

Solichin (Waluyo, 2007) menyatakan bahwa Pengaturan terbuka mencakup batasan otoritatif terhadap masyarakat dan kekuatan koersif yang tidak dimiliki oleh pendekatan yang dilakukan oleh organisasi swasta. Sementara itu, Keban (Tahir, 2014: 20) mengklarifikasi bahwa pendekatan terbuka dapat dilihat dari beberapa sudut pandang: sebagai konsep filosofis, produk, persiapan dan sistem. Sebagai sebuah konsep filosofis, penataan dapat berupa seperangkat standar atau kondisi yang sempurna. Sebagai sebuah item, pendekatan dianggap sebagai kumpulan kesimpulan atau saran. Sebagai persiapan, pengaturan berfungsi sebagai strategi yang membuat organisasi mencapai keinginannya. Dan sebagai suatu sistem, pendekatan merupakan hasil dari persiapan tawar-menawar dan transaksi dalam menentukan permasalahan dan strategi pelaksanaannya.

3. Metode Penelitian

Kualitatif adalah metode yang digunakan oleh peneliti, dengan teknik pengumpulan data melalui telaah dokumen, Observasi dan wawancara. Informan penelitian adalah Wadir I Bidang Akademik 1 Orang, Wadir II Bidang SDM 1 Orang, Ketua Program Studi

1 Orang, Ketua LPPM 1 Orang, dan Dosen 2 Orang. Prosedur pengolahan dan analisis data dilakukan melalui lima tahapan yaitu tahap pengumpulan data, reduksi data, pengelompokan data, verifikasi data, dan penarikan kesimpulan (Akasah, 2024).

4. Hasil dan Pembahasan Penelitian

Dosen mempunyai peranan yang sangat penting sebagai ujung tombak pemanfaatan seluruh pengajaran dan persiapan pendidikan. Penutur terlalu perhatian terhadap proses pendidikan dan pembelajaran, maka dalam upaya memajukan mutu pendidikan tinggi, guru memegang peranan dan posisi yang sangat penting dalam keseluruhan proses pendidikan, khususnya pada pendidikan tinggi (Trianto, 2007). Penelitian yang terjadi dapat digambarkan sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Randall B. Repley dan Beauty A. Franklin mengenai kemenangan penggunaan pendekatan, terdapat tiga dimensi yaitu: Tingkat kepatuhan terhadap pengendalian yang tepat, kelancaran penggunaan jadwal yang berguna, dan realisasi dampak pelaksanaan yang diperlukan. Ketiga pengukuran ini dibuat menjadi 9 penanda untuk menguji keberhasilan aktualisasi pengaturan standar bagi guru di lingkungan Program Renungan Organisasi Niaga Politeknik Informatika Nasional Makassar.

Hasil Penelitian diperoleh bahwa belum berhasilnya implementasi kebijakan Standar Dosen pada Program Studi Administrasi Bisnis Politeknik Informatika Nasional Makassar. Hal ini dikarenakan masih ada standar dosen yang belum dipatuhi, serta belum terselenggara aktifnya kegiatan penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat. Dampak dari implementasi kebijakan standar dosen juga belum tercapai.

PEMBAHASAN

A. Tingkat Kepatuhan akan ketentuan yang berlaku

Mazmanian dan Sabatier dalam (Abdul Wahab, 2004) Implementasi dipandang sebagai pelaksanaan keputusan dari legislatif, eksekutif, atau yudikatif. Menurut Repley dan Franklin, penerapan kebijakan dikatakan efektif jika ada kepatuhan terhadap isi kebijakan. Artinya, kebijakan tersebut telah diimplementasikan sebagaimana mestinya sehingga tujuan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Tingkat kepatuhan terhadap

kebijakan dapat dilihat melalui indikator berikut:

a. Dosen Tetap

Dalam Standar Mutu Politeknik Informatika Nasional Makassar dengan No. STD-05-02 Tahun 2013 disebutkan mengenai Standar Tenaga Dosen Tetap: Dosen tetap Politeknik Informatika Nasional sekurang-kurangnya harus memiliki kualifikasi akademik S2. Harus memiliki ijazah telah terakreditasi oleh BAN-PT dengan peringkat B serta memiliki IPK setidaknya 3.00. Sehat jasmani serta sehat rohani. Harus memiliki posisi akademik sekurang-kurangnya asisten ahli dan/atau memiliki sertifikat mengajar. Harus memiliki kepribadian yang baik dan bisa diterima di semua kalangan. Harus memiliki status sebagai karyawan tetap yayasan dengan nomor registrasi yang ditentukan oleh yayasan. Melaksanakan Tri-Dharma Perguruan tinggi dengan beban 12-16 SKS Perminggu persemester. Melaksanakan tugas di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat minimal satu kali dalam satu semester. Dosen tetap diharuskan menyusun minimal satu publikasi hasil penelitian di jurnal ber-ISSN, baik di lingkungan internal maupun yang diterbitkan oleh institusi lain persemester. Menyusun minimal satu karya tulis ilmiah yang dipresentasikan dalam seminar dosen dan mahasiswa setiap semester. Mematuhi kode etik dosen serta peraturan kepegawaian lainnya yang telah ditetapkan oleh pimpinan. Namun, penjelasan dari hasil analisis data yang didasarkan pada akumulasi hasil wawancara dengan informan menunjukkan bahwa hal tersebut belum berhasil terimplementasi sepenuhnya di Program Studi Administrasi Bisnis Politeknik Informatika Nasional Makassar. Dari akumulasi hasil wawancara terhadap informan diketahui bahwa tidak semua dosen tetap memegang posisi akademik minimal asisten ahli dari 40 pengajar tetap di program Studi Administrasi Bisnis hanya 20 orang yang memiliki jabatan akademik, sisanya hanya berstatus sebagai staf pengajar. Dari hasil wawancara dengan Informan juga ditemukan data bahwa tidak semua dosen di Program Studi Administrasi Bisnis melaksanakan kewajibannya di bidang penelitian dan pengabdian masyarakat. Dosen harus memiliki kepribadian baik, status karyawan tetap yayasan, dan melaksanakan Tri-Dharma Perguruan Tinggi dengan beban 12-16 SKS per semester. Setiap semester,

dosen wajib melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat minimal satu kali, serta mempublikasikan hasil penelitian di jurnal ber-ISSN dan menyusun karya ilmiah yang dipresentasikan di seminar. Dosen juga harus mematuhi kode etik dan peraturan kepegawaian. Namun, hasil wawancara menunjukkan kebijakan ini belum sepenuhnya terlaksana di Program Studi Administrasi Bisnis Politeknik Informatika Nasional Makassar, karena dari 40 dosen tetap, hanya 20 yang memiliki jabatan akademik, dan banyak yang belum melaksanakan kewajiban penelitian serta pengabdian masyarakat.

b. Dosen Tidak Tetap

Dalam Standar mutu Politeknik Informatika Nasional Makassar dengan No. STD-05-02 Tahun 2013 disebutkan mengenai Standar Tenaga Dosen Tidak tetap: Dosen tidak tetap harus memiliki kualifikasi S1 di bidang yang relevan, mematuhi kode etik, dan memiliki indeks kinerja minimal 3.00 berdasarkan survei mahasiswa. Hasil wawancara menunjukkan bahwa standar ini telah diterapkan dengan baik di Program Studi Administrasi Bisnis Politeknik Informatika Nasional Makassar. Dari hasil wawancara terhadap informan diketahui bahwa penggunaan Dosen tetap di Program Studi Administrasi Bisnis lebih menjadi bahan perhatian, karena dosen yang direkrut adalah dosen yang memiliki pengalaman dan merupakan dosen praktisi. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas mahasiswa.

c. Dosen Tamu

Dalam Standar mutu Politeknik Informatika Nasional Makassar dengan No. STD-05-02 Tahun 2013 disebutkan mengenai Standar Tenaga Dosen Tidak tamu: Dosen tamu memiliki kualifikasi akademik sekurang-kurangnya S2 untuk bidang ilmu yang relevan atau tokoh professional yang dianggap memiliki kompetensi untuk menjadi dosen tamu. Berdasarkan paparan dari hasil analisis data sesuai akumulasi dari hasil wawancara terhadap informan, Standar dosen tamu telah terimplementasi dengan baik pada Program Studi Administrasi Bisnis Politeknik Informatika Nasional Makassar. Dari hasil wawancara terhadap informan diketahui bahwa penggunaan Dosen tamu di Program Studi Administrasi Bisnis adalah tokoh

professional yang dianggap memiliki kompetensi untuk menjadi dosen tamu. Kegiatan tersebut memiliki tujuan dalam pengembangan dan peningkatan mutu pada Program Studi, Proses kegiatan dosen tamu sangat memiliki banyak manfaat, diantaranya dapat meningkatkan kerja sama dengan atau perguruan Tinggi lainnya, serta dapat meningkatkan mutu lulusan, serta bermanfaat juga kepada dosen guna meningkatkan mutu proses pembelajaran sehingga mutu lulusan dan mutu dosen dapat ditingkatkan seiring dengan visi dan misi dari Prodi Administrasi Bisnis.

d. Dosen Pembimbing Akademik

Dalam Standar mutu Politeknik Informatika Nasional Makassar dengan No. STD-05-02 Tahun 2013 disebutkan mengenai Standar Tenaga **Dosen Pembimbing Akademik**: Dosen pembimbing akademik harus merupakan dosen tetap yang ditunjuk oleh yayasan dan melakukan bimbingan minimal tiga kali per semester. Dosen pembimbing juga harus mendokumentasikan dan menyerahkan rekapitulasi hasil bimbingan kepada pimpinan program studi. Hasil wawancara menunjukkan bahwa standar ini telah diterapkan dengan baik di Program Studi Administrasi Bisnis Politeknik Informatika Nasional Makassar. Sehingga bisa membantu dan mendorong mahasiswa menyelesaikan studinya. Perguruan tinggi diharapkan menyediakan Atasan Ilmiah. Pembimbing skolastik adalah guru yang ditunjuk dan diberi tugas serta tugas untuk mengarahkan beberapa siswa dengan tujuan membantu siswa dalam menyelesaikan pemikirannya secepat dan secepat mungkin sesuai dengan keadaan dan potensi pribadi siswa.

e. Dosen Pembimbing dan Penguji Tugas Akhir

Dalam Standar mutu Politeknik Informatika Nasional Makassar dengan No. STD-05-02 Tahun 2013 disebutkan mengenai Standar Pembimbing dan Penguji Tugas Akhir : Dosen pembimbing tugas akhir harus berpengalaman minimal 2 tahun dengan kualifikasi S1/DIV atau jabatan akademik asisten ahli. Dosen penguji I harus memiliki S2 yang relevan atau S1 untuk praktisi, sedangkan penguji II minimal berijazah S1 dan berpengalaman di metodologi penelitian.

Berdasarkan paparan dari hasil analisis data sesuai akumulasi dari hasil wawancara terhadap informan, Standar dosen Pembimbing dan Penguji Tugas Akhir telah

terimplementasi dengan baik pada Program Studi Administrasi Bisnis Politeknik Informatika Nasional Makassar. Dari hasil wawancara terhadap informan diketahui bahwa Dosen yang ditunjuk sebagai pembimbing tugas akhir adalah dosen yang memiliki pengalaman minimal 2 tahun, untuk dosen yang masih S1 harus memiliki jabatan akademik. Sedangkan untuk dosen penguji menggunakan dosen yang relevan dengan bidang keilmuannya serta telah berpengalaman dalam metodologi penelitian.

B. Lancarnya Proses Pelaksanaan Rutinitas Fungsi

Repley dan Franklin menyatakan bahwa “Kesuksesan terhadap Eksekusi pengaturan ditandai dengan lancarnya pengerjaan jadwal dan tidak munculnya permasalahan atau permasalahan yang dialami. Dalam organisasi, kelancaran jadwal sangat penting untuk mencapai tujuan organisasi”.

Berdasarkan pernyataan di atas faktor lancarnya pelaksanaan rutinitas fungsi yang berlaku Implementasi Kebijakan Standar Dosen pada Program Studi Administrasi Bisnis Politeknik Informatika Nasional Makassar dapat dilihat pada indikator di bawah ini:

a. Terselenggaranya Proses Pendidikan yang berkualitas

Penggunaan pelatihan yang berkualitas dapat berupa gelar yang digunakan untuk melihat bagaimana pegangan pendidikan ada dalam program pemikiran Organisasi Perdagangan. Selanjutnya, perguruan tinggi harus menerapkan teknik penyusunan pembelajaran yang berkualitas. Pembelajaran yang bermutu mencakup segala bentuk yang terjadi dalam penyusunan dan penyampaian materi pelajaran, penilaian terhadap metode dan hasil, serta seluruh komponen yang terlibat dalam upaya memenuhi kebutuhan klien khususnya mahasiswa dan dunia kerja. Terselenggaranya proses pendidikan yang berkualitas pada Program Studi Administrasi Bisnis dapat dilihat pada pencapaian IPK Mahasiswa 70% di atas 3.00, Mahasiswa Siap Kerja dan Berwirausaha, dan Akreditasi Program Studi Standar dosen pembimbing dan penguji tugas akhir telah diterapkan dengan baik di Program Studi Administrasi Bisnis Politeknik Informatika Nasional Makassar, ditunjukkan dengan 70% mahasiswa memiliki IPK di atas 3.00. Keberhasilan ini didukung oleh perencanaan pra perkuliahan, penyusunan RPS, dan pelatihan kewirausahaan serta soft skills. Program studi juga berhasil meningkatkan akreditasi dari C ke B.

b. Terselenggaranya Proses Penelitian yang unggul

Menanyakan tentang adalah salah satu tugas utama dari pengajaran yang lebih tinggi pendidikan petunjuk Sinonim yang memberikan dampak dan manfaat bagi penyelenggaraan pembelajaran, peningkatan ilmu pengetahuan, inovasi dan ekspresi (IPTEKS), serta memajukan kualitas hidup masyarakat. Program peninjauan mempunyai akses terhadap pelaksanaan penyelidikan yang mendukung tercapainya visi dan misi program dan lembaga pemikiran, disertai dengan akses luas ke kantor-kantor yang diperlukan untuk penanganan penyelidikan. Pertimbangkan program guru dan siswa memainkan peran dinamis dalam melaksanakan penelitian yang berkualitas dan terorganisir, dengan fokus pada kebutuhan lembaga atau pihak yang berkepentingan. Hasil penelitian tersebut ditampilkan dalam lokakarya logis pada pertemuan-pertemuan nasional dan universal serta disebarluaskan dalam catatan harian nasional berlisensi global, sehingga dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang memerlukannya..

Memang meskipun kegiatan penelitian dosen mempunyai peranan yang sangat penting bagi perguruan tinggi, namun penggunaan penelitian dalam Program Pemikiran Organisasi Perdagangan sampai saat ini sering menghadapi berbagai kendala. Seringkali guru lebih memilih untuk memusatkan perhatian pada kewajibannya sebagai pengawas siswa dibandingkan melaksanakan tugas yang ditanyakan. Hal ini bukannya tanpa alasan, karena persoalan subsidi yang sering tidak sesuai dengan kebutuhan juga menjadi kendala. Selain itu, organisasi penyelidikan informasi yang kurang lazim sering kali menambah kompleksitas permasalahan. Situasi ini menyebabkan persiapan organisasi investigasi menjadi tidak terorganisir dan rumit.

Keadaan ini tentunya berdampak negatif terhadap inspirasi para analis di Program Pemikiran Organisasi Perdagangan yang moo. Faktanya, inspirasi sangat penting dalam menentukan efisiensi analis dan kualitas karya ilmiah yang dihasilkan.

c. Terselenggaranya Proses Pengabdian yang berdayaguna bagi masyarakat

Pemikiran tentang program memainkan peran dinamis dalam menyusun dan melaksanakan program dan pelaksanaan manfaat dan manfaat masyarakat, serta menunjukkan kecukupannya dalam kehidupan masyarakat. Manfaat ini dilaksanakan

sebagai bentuk kontribusi keterampilan, menerapkan hasil pengajaran dan penelitian dalam bidang ilmu pengetahuan, inovasi dan ekspresi, dalam rangka memenuhi kebutuhan atau membawa perubahan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Pengabdian kepada masyarakat merupakan tanggung jawab dosen dalam memberikan kontribusi bagi negara. Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat adalah bagian integral dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. Keduanya mencerminkan keterlibatan perguruan tinggi dalam pembangunan dan berfungsi untuk mengatasi permasalahan akademis yang terkait dengan isu-isu masyarakat secara umum.

Berdasarkan Paparan hasil analisis data berdasarkan akumulasi wawancara dengan para informan, untuk terselenggaranya proses pengabdian yang berdayaguna bagi masyarakat belum terselenggara dengan baik, banyak dosen yang belum melakukan kegiatan pengabdian pada masyarakat. Bahkan untuk tahun 2018 belum ada dosen yang memasukkan proposal untuk kegiatan penelitian. Hal ini dikarenakan masih kurangnya kesadaran dosen untuk melakukan pengabdian pada masyarakat.

C. Terwujudnya Dampak yang dikehendaki

Keberhasilan penggunaan suatu pendekatan bergantung pada pelaksanaan dan dampak yang diantisipasi dari pendekatan tersebut secara keseluruhan. Repley dan Franklin menyatakan bahwa kemenangan penggunaan aransemen dipisahkan menjadi dua sudut, yaitu pencapaian pelaksanaan aransemen dan pengaruh aransemen. Eksekusi pendekatan pencapaian lebih berpusat pada eksekusi jangka pendek, sedangkan pengaruh pendekatan ditandai dengan penggunaan yang dicapai dalam jangka panjang. Pengaruh suatu pengaturan merupakan hasil akhir yang diantisipasi, untuk menilai apakah pelaksanaan pengaturan telah berjalan sesuai keinginan. Untuk mengetahui apakah dampak yang diinginkan dalam implementasi standar Dosen pada Program Studi Administrasi Bisnis tercapai, hal ini dapat dilihat melalui indikator terpenuhinya rasio Dosen dan Mahasiswa.

Berdasarkan hasil analisis data dan wawancara dengan para informan, diketahui bahwa indikator terpenuhinya rasio Dosen dengan Mahasiswa pada Program Studi Administrasi Bisnis belum tercapai. Rasio dosen dan mahasiswa di Program Studi Administrasi Bisnis saat ini, mengacu pada SK Dikti Nomor 67/C/KL/2016 tentang

Perpanjangan Pemberlakuan Nisbah Dosen/Mahasiswa dan Sanksi, menetapkan bahwa program studi dengan rasio dosen/mahasiswa 1: ≥ 300 mahasiswa pada Pangkalan Data Dikti akan dinonaktifkan. Rasio ideal yang ditetapkan untuk program studi IPA adalah 1:30-300, dan untuk program studi IPS adalah 1:45-300.

Untuk sementara Program Studi Administrasi Bisnis memiliki jumlah mahasiswa sebanyak 1.200 lebih Mahasiswa dengan jumlah Dosen sebanyak 40 Dosen dengan rasio 1:34. Hal ini menunjukkan bahwa belum tercapainya rasio dosen dan mahasiswa yang sehat sesuai yang dipersyaratkan oleh LLDIKTI 1:45.

5. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang disampaikan oleh Randall B. Repley dan Grace A, mengenai Aspek keberhasilan kebijakan maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: Implementasi Kebijakan Standar Dosen pada program Studi Administrasi Bisnis Politeknik Informatika Nasional dilihat dari Aspek Tingkat kepatuhan pada ketentuan yang berlaku belum terlaksana dengan baik. Program Studi Administrasi Bisnis belum mematuhi Standar dosen diantaranya masih adanya Dosen tetap yang belum memiliki jabatan akademik dan belum semua dosen program Studi Administrasi Bisnis melaksanakan kewajibannya di bidang penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat. Aspek Berdasarkan Lancarnya pelaksanaan Rutinitas Fungsi, belum berjalan dengan baik. Karena kegiatan dosen masih fokus pada penyelenggaraan Pendidikan yang berkualitas. Sementara untuk kegiatan Penelitian dan Pengabdian pada masyarakat masih dianggap belum penting. Aspek selanjutnya yaitu terwujudnya dampak yang dikehendaki. Dalam hal ini dampak jumlah rasio dosen dan mahasiswa 1:45 belum berhasil dicapai, hanya mencapai 1:34. Maka adapun saran dari permasalahan di atas adalah: Ketua Program Studi Administrasi Bisnis Politeknik Informatika Nasional Makassar menyusun analisis kebutuhan tenaga pendidik (Dosen) untuk tiap mata kuliah sesuai dengan kompetensi dan bidang keilmuan. Program Studi Administrasi Bisnis melakukan Pelatihan sesuai kebutuhan dan memfasilitasi dosen-dosennya untuk mengurus jabatan akademik. Terus mendorong dosen-dosennya untuk melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Melakukan evaluasi kinerja tenaga pendidikan (Dosen).

Daftar Pustaka

- A., T. (2014). *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Bandung: Alfabeta.
- Abdul Wahab, S. (2004). *Analisis Kebijakan : dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Bumi Aksara Jakarta.
- Akasah, M. (2024). KEBIJAKAN PROGRAM UJI KOMPETENSI DALAMMENINGKATKAN PROFESIONALISMEWARTAWAN DI KOTA SUKABUMI. *Mimbar Administrasi Mandiri*, 20, 99-111.
- Mulyadi. (2015). *Implementasi Organisasi*. Gadjah Mada Univercity Press.
- Nugroho, R. (2014). *Kebijakan Sosial untuk Negara Berkembang*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Pratama. (2015). *Analisis Kebijakan dari Formulasi Ke Model Implementasi Kebijakan*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Rachmawati, I. (2023). PENGARUH MOTIVASI TERHADAP PRODUKTIVITAS PEGAWAI PADA PUSKESMAS GEDONGPANJANG KOTAISUKABUMI. *Mimbar Administrasi Mandiri*, 19, 79-92.
- Taufik, M. dan I. (2013). Implementasi Peraturan Daerah Badan Permusyawaratan Desa. In *Jurnal Kebijakan Publik* (Vol. 4, Issue 2).
- Thoha, M. (2014). *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Trianto. (2007). *Model-model Pembelajaran Inovatif Berorientasi Konstruktivistik*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Waluyo. (2007). *Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi, Dan Implementasi) Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Bandung: Mandarmaju.